Laporan Bulanan

PPID Bulan Maret 2022

KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BALAI VETERINER LAMPUNG

2022

Laporan Bulanan

PPID Bulan Maret 2022

Pendahuluan

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini, membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (UU KIP). UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Kementerian Pertanian yang memiliki banyak informasi dan dokumen di setiap unitnya. Selanjutnya, menjadi tugas pegawai Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data/informasi tersebut dengan benar kepada publik. Hal ini merupakan komitmen dari Kementerian Pertanian untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian khususnya di Balai Veteriner Lampung (Bvet Lampung).

Setiap permohonan informasi publik yang menggunakan dasar hukum UU KIP dan/atau ditujukan kepada PPID Bvet Lampung akan dilayani melalui mekanisme layanan informasi publik melalui PPID. Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan melalui berbagai saluran yang tersedia, dengan melampirkan bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Badan Hukum Indonesia.

No	Bulan	Jumlah	Pemohon	Proses Layanan		
				Dipenuhi	Dialihkan	Ditolah
1	Maret	7	Budi Eko	Dipenuhi		
			Dwi Suryadi	Dipenuhi		
			Slamet	Dipenuhi		
			Nirma Diana	Dipenuhi		
			Anggi	Dipenuhi		
			Lamelda	Dipenuhi		
			Santi Susilawati	Dipenuhi		
			Tri Wahyuni	Dipenuhi		

Dari tabel diatas menggambarkan di bulan Maret adanya peningkatan permohonan informasi publik dari masyarakat, Adapun jenis jenis permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Data Surveilans di wilayah Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kep. Bangka Belitung;
2. Informasi tentang penyakit hewan (LSD);
3. Teknik pembuatan VTM;
4. Tarif pelayanan dan pengujian;
5. Informasi tentang laboratorium;
6. Data Peternakan babi di provinsi lampung;

Dari 7 pemohon informasi merasa puas karena dalam waktu yang tidak terlalu lama (yakni tidak lebih dari 2 hari) sudah dapat diselesaikan.

Kesimpulan

- Perlu dilakukan analisa kebutuhan informasi public oleh masyarakat sehingga mampu menjaring kebutuhan informasi lebih luas lagi;
- Terus meningkatkan pelayanan sehingga mampu meningkatkan permohonan informasi public;
- Semakin meningkatnya permohonan informasi membuktikan adanya keingintahuan terhadap hal hal yang menjadi informasi public Balai Veteriner Lampung.

Demikian laporan ini dibuat, semoga dapat memberikan gambaran tentang informasi public di UPT Balai Veteriner Lampung.

PPID Balai Veteriner Lampung

drh Tri Guntoro, MP